

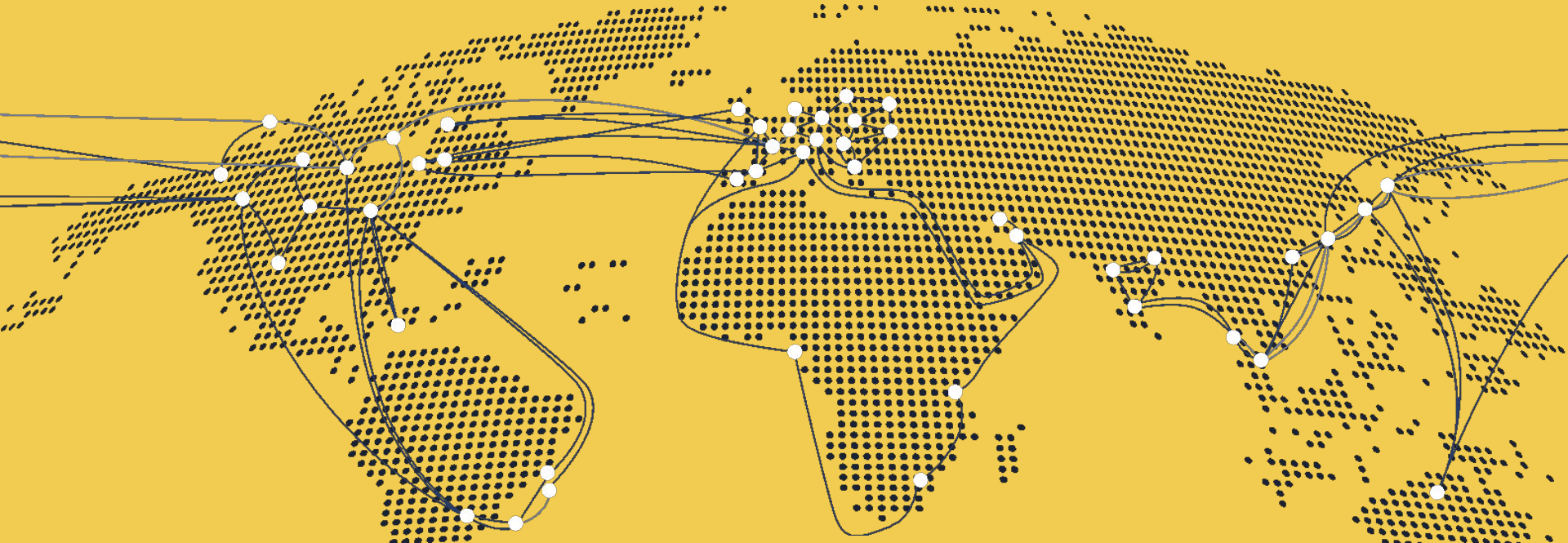
●●● Mitigasi Risiko  
●●● Penggunaan  
●●● *Information and  
Communications  
Technology (ICT)*  
●●● untuk Tindak Pidana  
Pencucian Uang  
(TPPU) dan Tindak  
Pidana Pendanaan  
Terorisme (TPPT)

●●● **Semuel A. Pangerapan**  
●●● Direktur Jenderal Aplikasi  
●●● Informatika (APTIKA)  
07 November 2023

*Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital,  
Semakin Maju*



# Dunia digital membuat semua negara saling *terkoneksi*



# Terkoneksinya negara-negara membawa *implikasi*



*Blurred Identities*



Pemudaran Kedaulatan  
Legal dan Kultural Negara  
di Lanskap Digital

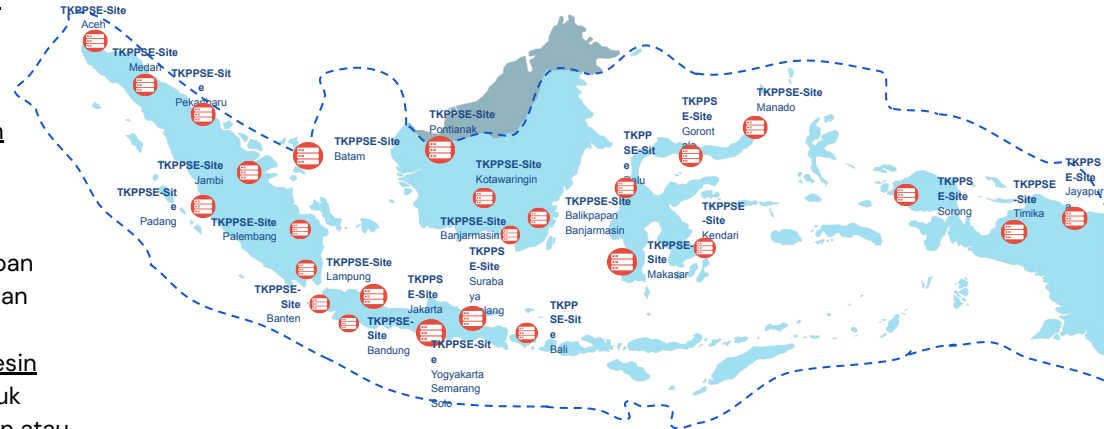
# Batas Maya Negara/Virtual Borderline

## Untuk Membatasi Ruang Digital Tanpa Batas

Terbatas

Virtual Borderline ini digunakan untuk pengendalian 6 Kategori PSE Lingkup Privat:

1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran barang dan/atau jasa;
2. yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan pengiriman materi atau muatan digital berbayar
4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
5. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya
6. untuk pemrosesan data pribadi





**Digital Forensics** hadir sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan siber melalui proses identifikasi dan pelacakan pelaku, serta preservasi bukti digital secara forensik untuk digunakan dalam proses hukum.

### Tahap Penanganan Pertama Bukti Elektronik\*

Identifikasi

Koleksi

Akuisisi

Preservasi

**Digital  
Forensics:**  
*Langkah  
Penyelidikan  
untuk  
menemukan  
Bukti Digital*

\*Berdasarkan Draft RPM tentang Pedoman Penanganan Pertama Bukti Elektronik

**Studi**

*Kasus*

# Rencana *Regulasi*

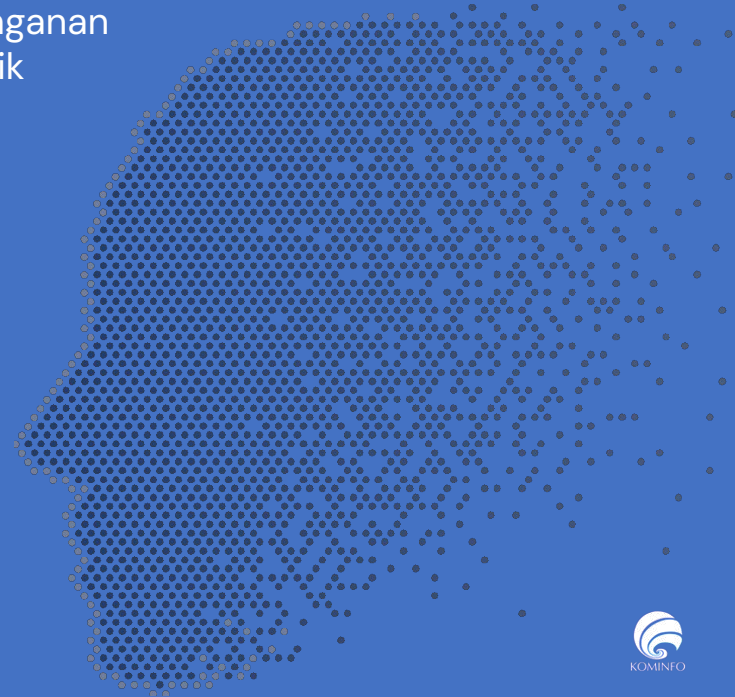
07/11/23

7

Surat Edaran Menkominfo No. 4 tahun 2019 tentang Panduan Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, dan Preservasi Bukti Digital




Peraturan Menteri Kominfo terkait Pedoman Penanganan Pertama Bukti Elektronik





Terima kasih

 **Semuel A. Pangerapan**  
Direktur Jenderal Aplikasi  
Informatika (APTIKA)  
07 November 2023

*Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital,  
Semakin Maju*





**ASEAN**  
INDONESIA  
2023 

**PEMETAAN RISIKO DAN DUKUNGAN INTELIJEN  
KEUANGAN DALAM PENANGANAN TPPU DAN  
TPPT MELALUI PENYALAHGUNAAN  
*INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY (ICT)***

**DISAMPAIKAN OLEH:  
FITHRIADI MUSLIM  
DIREKTUR HUKUM & REGULASI  
PPATK**





# FOKUS DISKUSI



EVOLUSI AKTIVITAS  
PENCUCIAN

1



TPPU DENGAN ICT  
SEBAGAI ENABLER

2



DUKUNGAN PPAK  
ATAS REGTECH DAN  
DIGITAL EVIDENCE

3



URGENSI REGTECH  
PADA PENERAPAN  
PROGRAM APU PPT

4

**BAGIAN 1:**  
**EVOLUSI AKTIVITAS**  
**PENCUCIAN**

**Asset Recovery**



# TREN PENCUCIAN UANG TERKINI

## Polisi Duga Cuci Uang Robot Trading Viral Blast Lewat Kripto

CNN Indonesia

Selasa, 22 Feb 2022 13:49 WIB

Bagikan:  



Ilustrasi kripto. Bareskrim menemukan dugaan cuci uang pengelola Viral Blast lewat kripto. (iStockphoto)

Jakarta, CNN Indonesia – Polisi menduga pengelola aplikasi **robot trading** Viral Blast Global melakukan pencucian uang melalui aset-aset digital berupa **cryptocurrency** atau mata uang **kripto**.

Aplikasi tersebut merupakan salah satu praktik investasi bodong yang dikuak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa waktu lalu.

"Ada beberapa yang kami amankan itu aset tidak berwujud, di rekening kripto," kata Kasubdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditiplideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana kepada wartawan, Selasa (22/2).



## Setara Korupsi, Kasus Pencucian Uang dari Judi di RI Rp81 T

NEWS - Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

14 February 2023 13:15

SHARE |  



Foto: Domino Qiu Qiu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana perjudian pada 2022 hampir setara dengan tindak pidana korupsi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, berdasarkan pengungkapan perkara TPPU, PPATK telah memberikan hasil analisis dan pemeriksaan dari berbagai tindak pidana korupsi senilai Rp 81,3 triliun, dan perjudian Rp 81 triliun.

"Adapun untuk green financial crime ini terkait sumber daya alam senilai Rp 4,8 triliun, terkait tindak pidana narkoba Rp 3,4 triliun, penggelapan dana yayasan Rp 1,7 triliun dan perkara lainnya," ujar Ivan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023).

## RAWANNYA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MEDIA PENDANAAN TERORISME

OP-1111

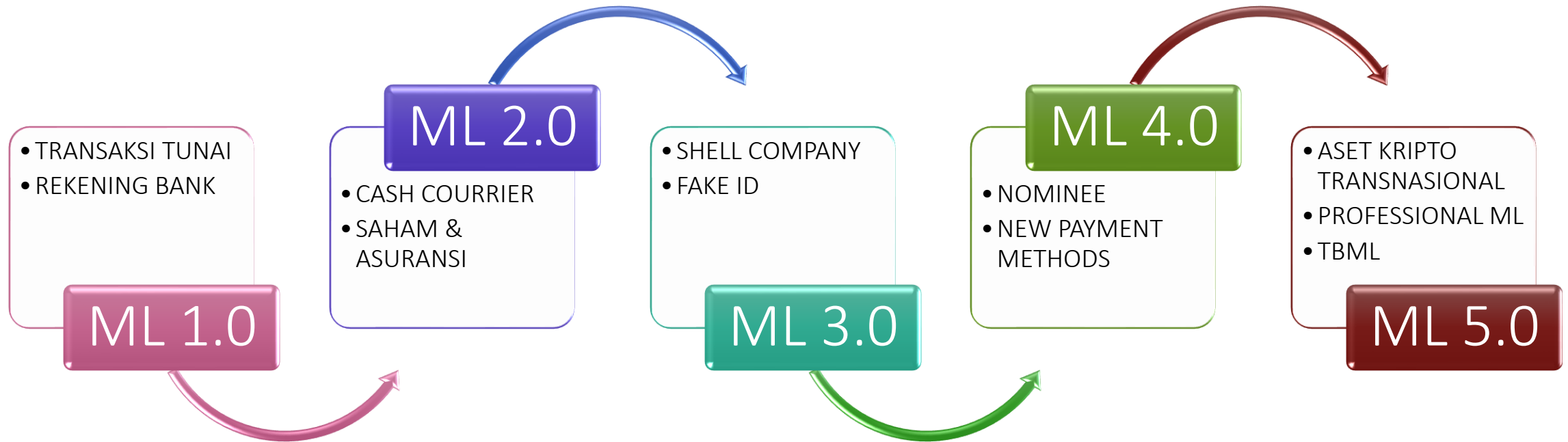
02 Jan 2023 | Gema Justisia | 273



**Gemajustisia.com** - Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 membawa transisi di banyak sektor kehidupan masyarakat. Kehadiran digitalisasi membawa perubahan yang sebelumnya sifatnya konvensional menjadi digital sehingga dengan adanya kemajuan teknologi tersebut membawa dampak yang positif dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat seperti dalam hal efisiensi maupun aksesnya yang mudah.

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir dan canggih menghasilkan banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui adanya akses internet, misalnya seperti alat transaksi pembayaran yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa, dari uang logam, uang kertas, bahkan adanya uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran *online*.

# EVOLUSI AKTIVITAS PENCUCIAN UANG



# TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI

No	Jenis Tindak Pidana Asal	Tingkat Ancaman TPPU	Tingkat Kerentanan TPPU	Tingkat Dampak TPPU	Tingkat Kecenderungan TPPU	Tingkat Risiko	Kategori Risiko TPPU
1	Korupsi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Narkotika	7,80	5,88	8,02	7,65	7,24	Tinggi
3	Di Bidang Perpajakan	6,92	3,90	8,28	6,73	6,74	Menengah
4	Di Bidang Perbankan	6,25	6,00	7,16	6,90	6,18	Menengah
5	Di Bidang Kehutanan	4,29	7,50	6,11	6,28	5,19	Menengah
6	Penipuan	6,37	5,59	5,51	6,86	5,14	Menengah
7	Di Bidang Lingkungan Hidup	4,46	7,03	6,01	6,26	5,12	Menengah

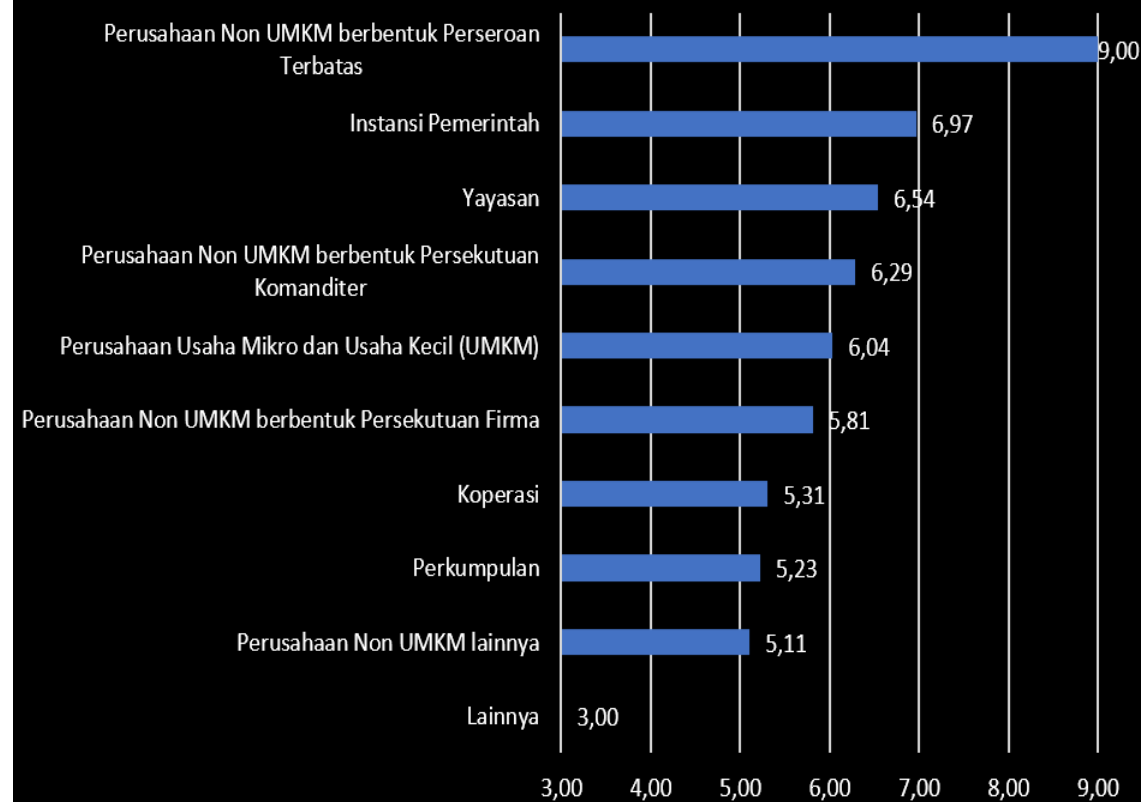


# PELAKU DAN PROFIL BERISIKO TINGGI

No	Kategori Pelaku TPPU	Tingkat Ancaman TPPU	Tingkat Kerentanan TPPU	Tingkat Dampak TPPU	Tingkat Kecenderungan TPPU	Tingkat Risiko	Kategori Risiko
1	Korporasi	4,17	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Perorangan	9,00	3,00	8,03	7,79	7,47	Tinggi
3	Perikatan Hukum (Legal Arrangements) -Foreign Trust	3,00	4,36	3,00	3,00	3,00	Rendah

No	Jenis Profil Pekerjaan	Tingkat Ancaman TPPU	Tingkat Kerentanan TPPU	Tingkat Dampak TPPU	Tingkat Kecenderungan	Tingkat Risiko TPPU	Kategori Risiko
1	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah*	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)*	6,16	8,01	8,67	6,86	7,20	Tinggi
3	Pengusaha/ Wiraswasta	8,24	7,55	6,96	7,77	6,76	Menengah
4	Pegawai Swasta	7,73	5,94	7,90	6,58	6,58	Menengah
5	PNS (termasuk pensiunan)*	6,36	5,97	7,39	5,83	5,84	Menengah
6	Profesional dan Konsultan	5,45	8,45	5,86	6,70	5,52	Menengah
7	TNI/Polri (termasuk pensiunan)*	5,25	7,51	6,30	6,07	5,44	Menengah
8	Pegawai Bank	4,74	7,07	6,25	5,54	5,14	Menengah

## Tingkat Risiko TPPU menurut Jenis Usaha Badan Usaha

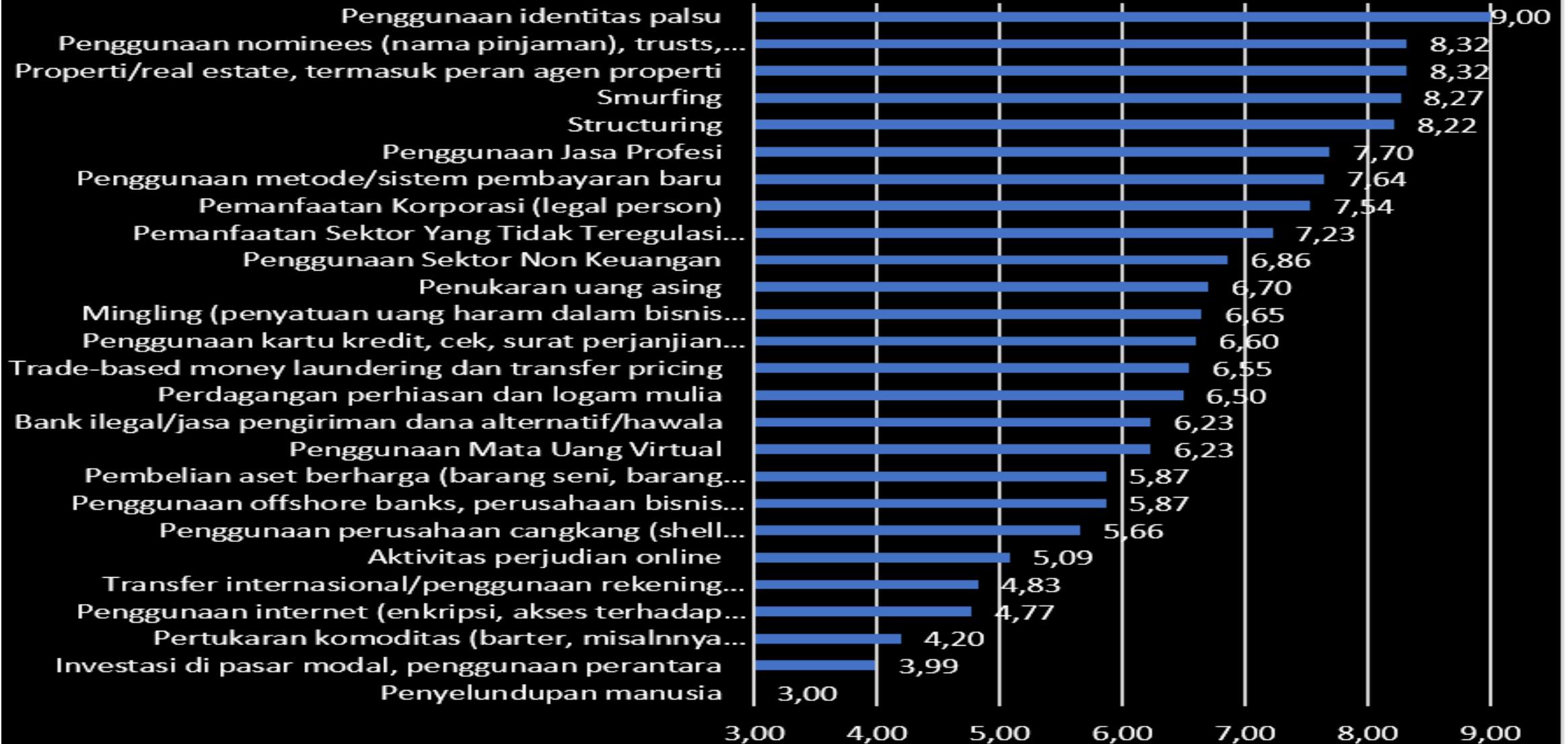


# SEKTOR INDUSTRI BERISIKO TINGGI

No	Pihak Pelapor	Tingkat Ancaman Total TPPU	Tingkat Kerentanan PP	Tingkat Kerentanan LPP	Tingkat PESTEL	Tingkat Kerentanan Total TPPU	Tingkat Kecenderungan	Tingkat Dampak TPPU	Tingkat Risiko TPPU
1	Pedagang Kendaraan Bermotor	6,67	9,00	5,00	6,08	9,00	8,87	9,00	9,00
2	Perusahaan Properti/Agen Properti	6,71	6,87	5,00	6,08	8,09	8,31	8,90	8,50
3	Bank Umum	9,00	3,09	3,00	9,00	6,87	9,00	7,82	8,19
4	Pedagang Valuta Asing	8,10	3,54	6,00	6,89	7,44	8,79	7,43	7,76
5	Penyelenggara Transfer Dana	7,28	3,31	3,00	7,22	6,21	7,46	7,21	6,78
6	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	6,92	3,00	3,00	9,00	6,83	7,63	7,04	6,77

NO	SEKTOR INDUSTRI	TINGKAT KERENTANAN PESTEL	KATEGORI
1	Akuntan	6,08	Menengah
2	Pejabat Pembuat Akta Tanah	5,92	Menengah
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	5,43	Menengah
4	Layanan Crowdfunding Berbasis Ekuitas	5,27	Menengah
5	Penyelenggara Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi	4,95	Rendah
6	Advokat	4,95	Rendah
7	Lembaga Keuangan Mikro	3,00	Rendah

# Tingkat Risiko TPPU menurut Tipologi



## **BAGIAN 2:**

# **TPPU DENGAN ICT SEBAGAI ENABLER**





# Definisi Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)

Serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT) dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melibatkan **multi stakeholders** termasuk masyarakat yang saling bekerja sama secara sistematis

- ☑ Undang-Undang 8/2010
- ☑ Undang-Undang 9/2013
- ☑ Peraturan Pemerintah
- ☑ Peraturan Presiden/Instruksi Presiden
- ☑ Peraturan Menteri/Kepala
- ☑ Surat Edaran
- ☑ Peraturan Hukum / Pedoman Pelaksana Program APUPPT dari Lembaga Pengawas dan Pengatur

Selengkapnya: <https://jdih.ppatk.go.id/>





# TUJUAN PENERAPAN REZIM APUPPT



**Standar  
Internasional**

**01**

Mematuhi Standar Internasional: The 40 Recommendations of FATF



**Dampak  
Negatif**

**02**

Melindungi Integritas Sistem Keuangan dan Keamanan Negara



**Mitigasi Risiko  
Pencucian Uang**

**03**

Mengendalikan Risiko Pencucian Uang Domestik dan Lintas Batas termasuk Kejahatan Asal

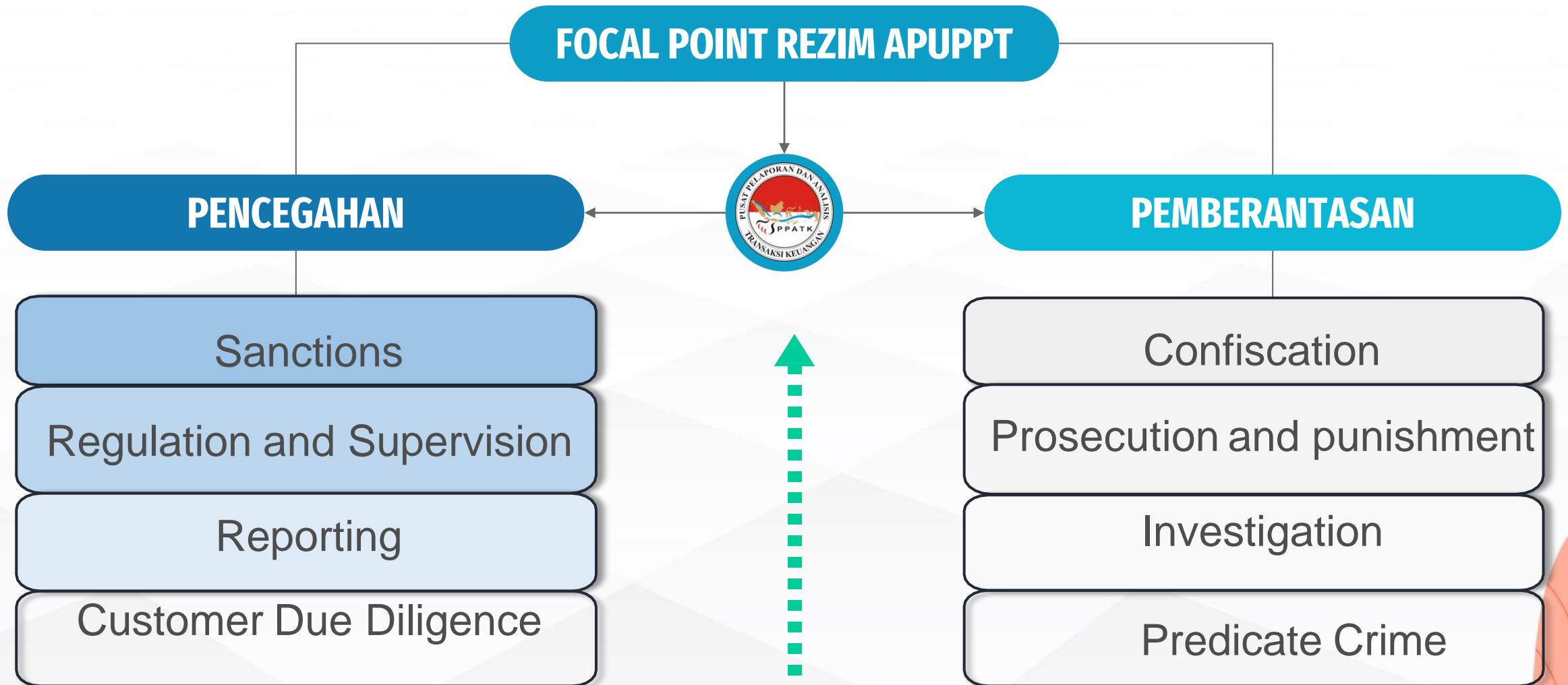


**Perampasan  
Aset**

**04**

Menciptakan Daya Disuasif (Efek Jera) dan Proporsional bagi Pelaku Kejahatan Pencucian Uang

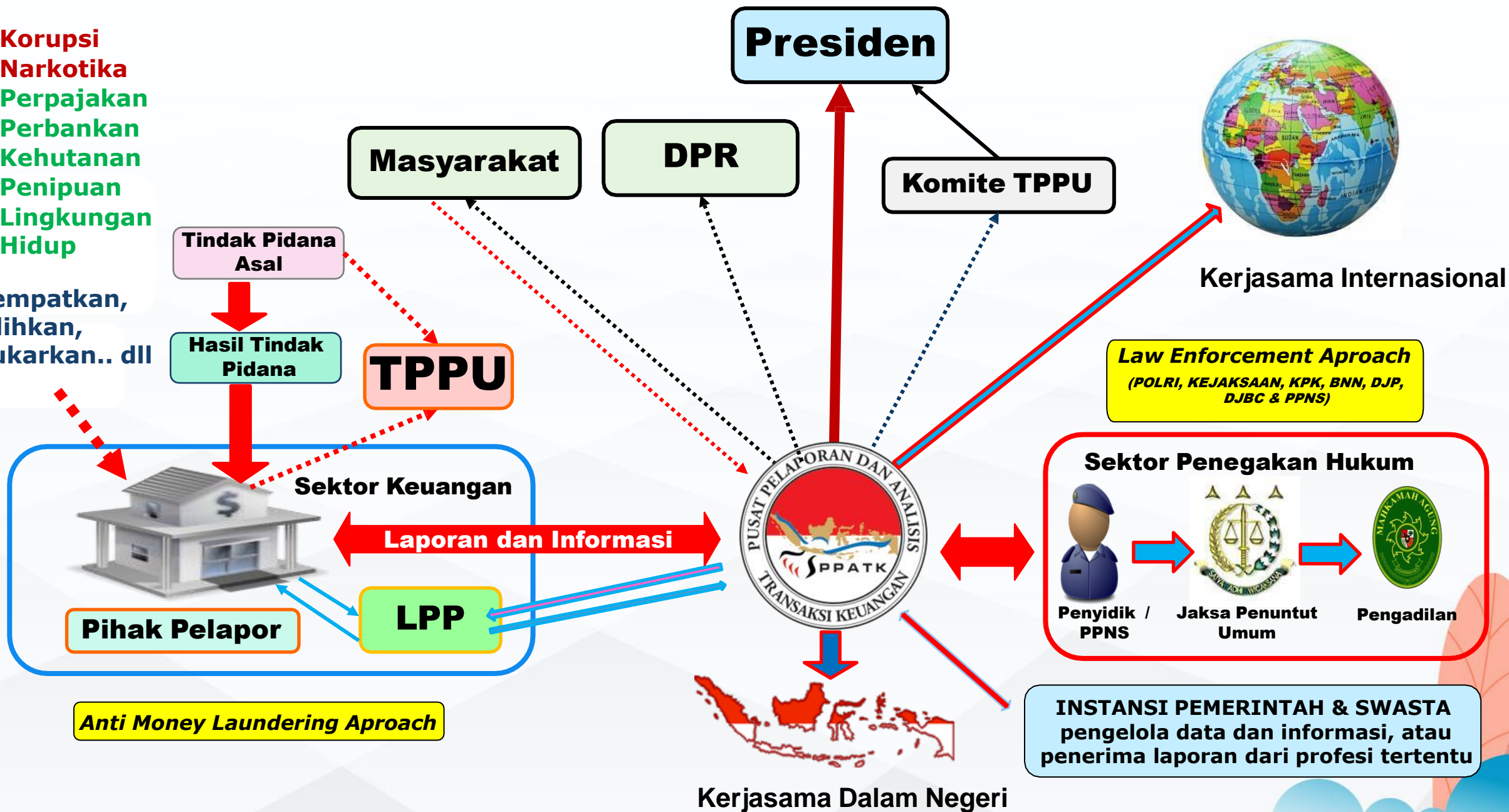
# PILAR REZIM ANTI PENCUCIAN UANG



# MEKANISME KERJA REZIM APUPPT

- 1. Korupsi
- 2. Narkotika
- 3. Perpajakan
- 4. Perbankan
- 5. Kehutanan
- 6. Penipuan
- 7. Lingkungan Hidup

ditempatkan,  
dialihkan,  
ditukarkan.. dll



**Anti Money Laundering Approach**

**Law Enforcement Approach**  
(POLRI, KEJAKSAAN, KPK, BNN, DJP, DJBC & PPNS)



**INSTANSI PEMERINTAH & SWASTA**  
pengelola data dan informasi, atau penerima laporan dari profesi tertentu

**Kerjasama Dalam Negeri**

# THE CHALLENGES ON DIGITAL TRANSFORMATION ON FIU AND LEA AREAS

## RESOURCES

The difficulty in securing adequate capital and recurrent financial resources, manpower, hardware and software



## DATA QUALITY

The need and additional resources to be spent on data cleaning and harmonisation before conducting any analysis, potentially delaying delivery and reducing effectiveness



## CREATING SOLUTIONS

The difficulty in identifying the most relevant workflow for transformation in order to maximise outcome..



## WORKFLOW RE-ENGINEERING

The need for organisational and structure changes, potentially causing unease among staff



## DATA/INFORMATION SECURITY

The difficulty in identifying the right tools to process and store data securely



## INADEQUATE REGULATION

Limited asset recovery guidance on asset recovery on crypto, the absent EDD for privacy coins, unclear for ICO, inadequate minimum requirement on RegTech (i.e Digital ID and live recognition)



## **BAGIAN 3:**

# **DUKUNGAN PPAK ATAS REGTECH DAN DIGITAL EVIDENCE**





# RANSOMWARE

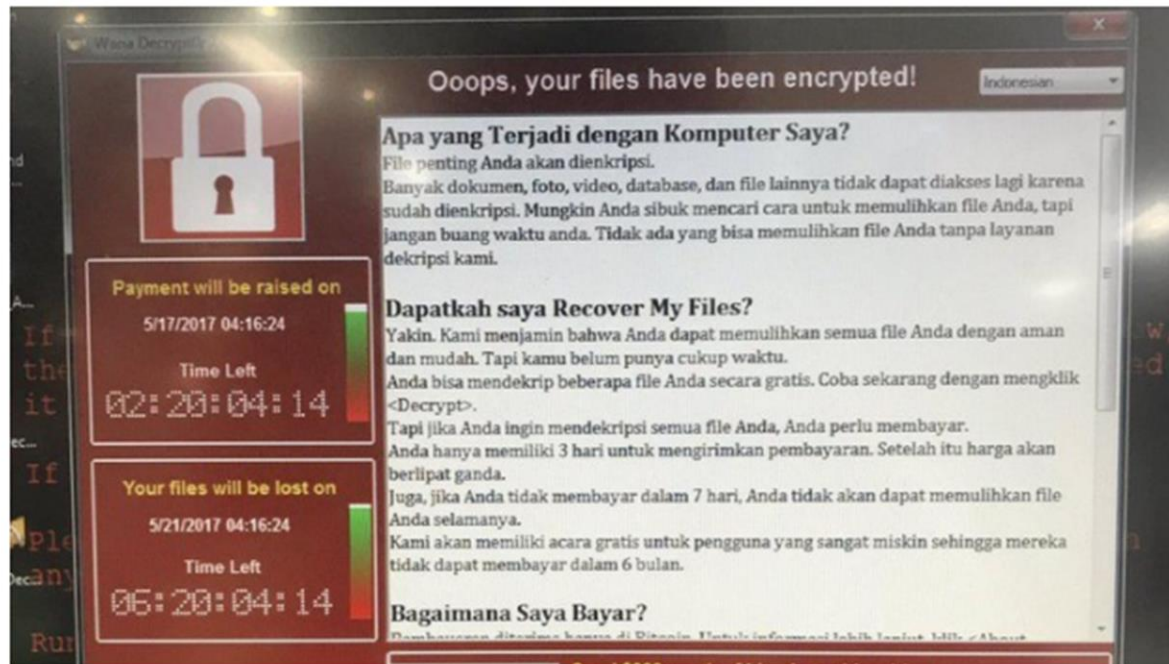
## Serangan WannaCry di Indonesia Terbesar Kedua di Dunia

Muhammad Alif Goenawan - detikinet

Minggu, 06 Mei 2018 12:40 WIB

1 komentar

SHARE



WannaCry di Indonesia. Foto: @ilhamnegara

Indonesia has the highest malware case rate, at 10.68 percent in 2019. Despite a 39 percent decline last year, This is still **2 times higher than the regional average.**

Indonesia is also listed as having the 2nd highest ransomware case rate in the entire Asia Pacific region, at 0.14 percent, despite a 46 percent drop last year. This is **2.8 times higher than the regional average.**

# SCAM – PONZI SCHEME

## Polda Metro tangkap buronan FBI kasus penipuan Bitcoin Rp11 triliun

© Selasa, 16 Juni 2020 21:22 WIB



Penyidik Polda Metro Jaya perlihatkan red notice tersangka RAM yang menjadi buronan FBI dan Interpol. ANTARA/Fianda Rassat

Home / News / Regional

## Ratusan Warga di Bangka Tertipu Investasi Virtual Menggunakan Bitcoin

Kompas.com - 10/01/2019, 21:12 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Magolda Kepulauan Bangka Belitung. (KOMPAS.com/HERU DAHNUR)



Penulis: Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur | Editor: Robertus Belarminus  
PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Ratusan warga di Kepulauan Bangka Belitung diduga menjadi korban penipuan transaksi internet BTC Panda yang menggunakan alat pembayaran Bitcoin.  
Dari 1.695 Bitcoin yang telah diinvestasikan, baru 200 yang dikembalikan pada anggota jaringan.  
"Kami berharap kasus ini bisa diurus tuntas. Semua pembagian hasil tidak dapat dipulihkan" kata Leader BTC Panda, Rivaldo, pada Minggu (10/1/2019).



www.sambilotoherbal.com

# TERRORIST FINANCING

Militant Bahrun Naim used PayPal, bitcoin to transfer funds for terror attacks in Indonesia



Bahrun Naim, one of Indonesia's most notorious militants, had used online payment services such as PayPal and bitcoins to transfer money for terrorist activities. PHOTO: REUTERS



Wahyu Soeriantmudja  
Indonesia Correspondent

PUBLISHED: JAN 9, 2017, 1:07 PM SGT



JAKARTA - Bahrun Naim, one of Indonesia's most notorious militants now fighting alongside ISIS in the Middle East, had used online payment services such as PayPal and bitcoins to transfer money to his comrades back home to fund terrorist activities, said anti-money-laundering agency PPAATK on Monday (Jan 9).

Start with as little as \$1\*



Discover at your own pace and learn about crypto with our articles for beginners.

Buy, hold, and sell crypto with PayPal



You can choose from Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash<sup>1</sup>

Discover crypto with peace of mind



Enjoy the same protections you're used to with PayPal.\*\*

## Telegram Bitcoin Wallet

### Telegram Bitcoin wallet

Join the revolution, send and receive bitcoins privately for free with your friends on telegram.

Lock your bitcoins to USD/EUR to avoid volatility.

Be in control of your own money without the "man in the middle..."

If you have Telegram, you can apply for early private beta access now.

Don't have Telegram yet? Download it now:

Get Telegram

#### Private Beta Access

Sign up below for private beta access to the telegram bitcoin wallet.

Telegram username

Email

BTC 1

USD 460.24

COPY RESULT TO CLIPBOARD

09/05/2016 00:03 by btcx.com





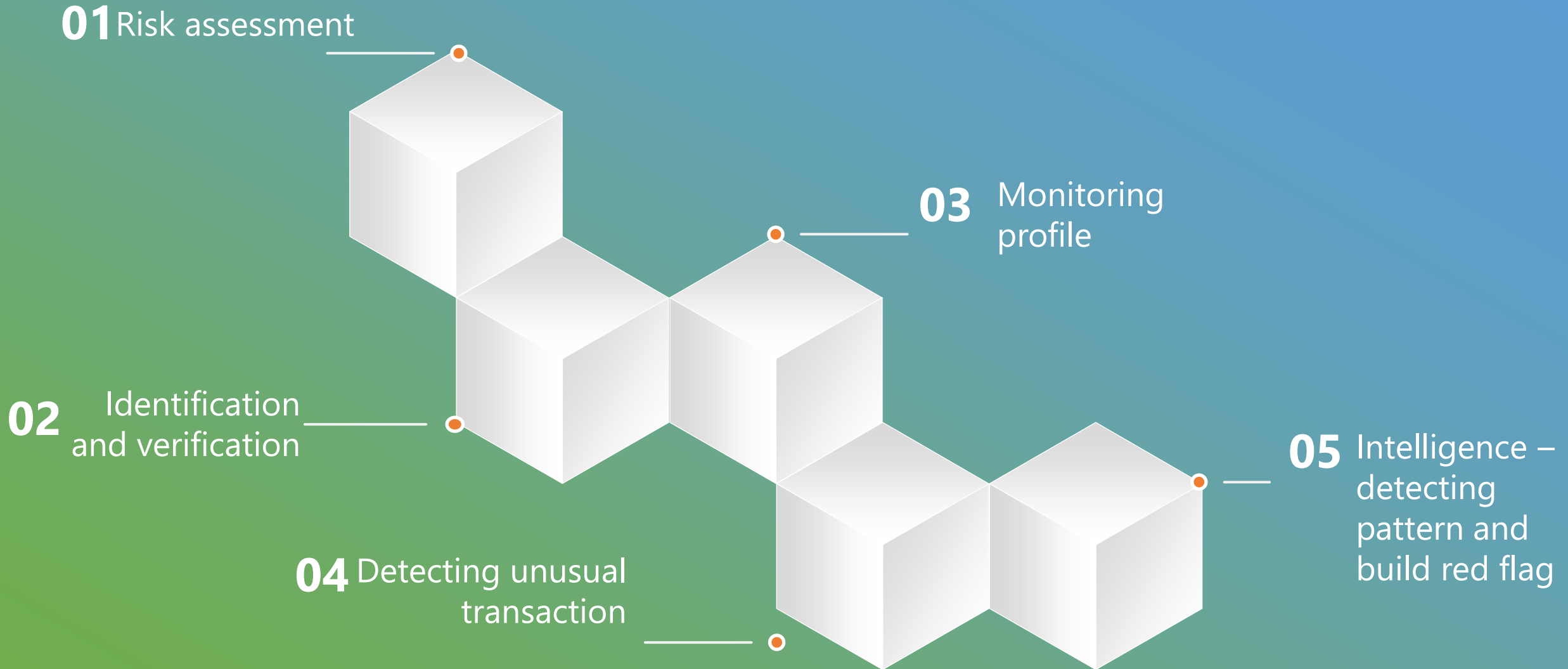
## **BAGIAN 4:**

# **URGENSI REGTECH PADA PENERAPAN PROGRAM APU PPT**





# REGTECH ON AML CFT PROGRAM AREAS



## EFFICIENCY

Reduce cost of compliance, simplifying and standardizing compliance process

## REAL TIME REPORTING

Enhanced regulatory reporting achieved through data activities and submission to authorities

## INTELLIGENCE

Advanced data analysing, examining regulatory information in various way

## ASSURANCE

Real time detection on unusual pattern profile and transaction for ML TF risk mitigation

## COMPLIANCE

Increase level of compliance and increase market stability

## FLEXIBLE

Flexibility and growth as business needs change without leaving the ML TF risk mitigation

## MARKET SURVEILLANCE

Review and approve any new or revised financial products and services before being offered to the market and customer

# BENEFITS OF REGTECH

# KEBIJAKAN DAN PROSEDUR APU PPT

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI BENEFICIAL OWNER

PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

PENGELOLAAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME YANG BERKELANJUTAN TERKAIT DENGAN NASABAH, NEGARA, PRODUK DAN JASA SERTA JARINGAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNELS)

PEMELIHARAAN DATA YANG AKURAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN PROSES CDD, DAN PENATAUSAHAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

PENINGKINAN DAN PEMANTAUAN

PELAPORAN KEPADA PEJABAT SENIOR, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

PELAPORAN KEPADA PPAK

# STRATEGI MITIGASI RISIKO TPPU TPPT



PIHAK PELAPOR WAJIB MELAKUKAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE,



MEMBATASI THRESHOLD TRANSAKSI TUNAI (BAIK UNTUK DEPOSIT MAUPUN PENARIKAN) – MEMANFAATKAN REKENING BANK



MEMBENTUK WATCH DOG UNTUK MEMANTAU TRANSAKSI PEER-TO-PEER & UNDERGROUND BANKING MELALUI BITCOIN DAN ALTCOIN MARKET PLACE PLATFORM



MENGHASILKAN RED FLAG INDIKATOR UNTUK VIRTUAL ASSET EXCHANGER DAN LEMBAGA KEUANGAN (SEBAGAI ANTARMUKA VIRTUAL ASSET)



MENINGKATKAN KEMAMPUAN FIU DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM UNTUK MENDETEKSI FINTECH DAN CRYPTOCURRENCY TRANSAKSI ML/TF





**REGULATIONS**

**COMPLIANCE**

**STANDARDS**

**POLICIES**

**RULES**

**Thank You**

PPATK

+62 21 3850455

contact-us(at)ppatk.go.id

www.ppatk.go.id





KOMINFO  
INDONESIA TERKONEKSI  
Makin Digital, Makin Maju

# STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI RUANG DIGITAL

Jakarta, 7 November 2023

Teguh Arifiyadi

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika

CekRekening.id



## PERIKSA REKENING

Pastikan transaksi online Anda aman!

Anda ingin bertransaksi online?  
Ingin men-transfer sejumlah uang ke rekening yang anda baru kenal?  
Cek disini!

Cek Sekarang →



## DAFTARKAN REKENING

Daftarkan rekeningmu sekarang!

Anda ingin pelanggan anda tenang ketika transaksi dengan anda?  
Atau ingin dipercaya oleh pelanggan anda?  
DAFTAR dan VERIFIKASI kan rekening anda!

Daftar Sekarang →



## LAPORKAN REKENING

Laporkan rekening yang mencurigakan!

Anda tertipu transaksi online?  
Dipaksa men-transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah?  
Laporkan sekarang!

Laporkan Sekarang →



## LAYANAN ADUAN NOMOR

 Cek Nomor Seluler

Pastikan komunikasi Anda aman!

Anda ingin bertransaksi online?  
Ingin memeriksa nomor seluler yang Anda baru kenal?

[Cek disini!](#)

 Laporkan Nomor Seluler

Laporkan nomor seluler yang mencurigakan!

Anda tertipu transaksi online?  
Dipaksa men-transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah?  
Laporkan nomor seluler-nya sekarang!

### Informasi Lain

[Tentang Kami](#)  
[Kebijakan Privasi](#)  
[Tanya Jawab](#)  
[AduanNomor.id](#)

[Tentang Kami](#)

[Kebijakan Privasi](#)

[Tanya Jawab AduanNomor.id](#)

**Tentang Kami**



## Lacak Aduan Konten

Pantau status terakhir aduan Anda dengan memasukkan nomor aduan.

[Lacak](#)

Fasilitas pengaduan situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi *mobile*, dan *software* berisi konten negatif

[www.kominfo.go.id](#)

DAFTAR  
UNGGAH  
PANTAU

ADUKAN KONTEN NEGATIF DI SINI  
aduankonten.id

## Tentang Aduan Konten

Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/*website*, URL, akun media sosial, aplikasi *mobile*, dan *software* yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta *screenshot* situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten.

Mari berpartisipasi aktif dan menjadikan internet lebih aman, nyaman, dan bermanfaat dengan berkurangnya konten-konten negatif.

## Pendaftaran Pelapor

Apakah ada konten yang ingin Anda adukan ? silakan daftar dibawah ini.

 Apakah anda robot

# STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA SITUS

Periode 1 Januari - 28 Agustus 2023

**TOTAL : 264.731**

**TOTAL  
PEMBLOKIRAN  
KONTEN NEGATIF :**

**496.705**

**Perjudian**  
**229.621**

**Pornografi**  
**32.428**

**HKI**  
**1.478**

**Konten Negatif  
yang Direkomendasikan  
Instansi Sektor**  
**840**

**Penipuan**  
**300**

**Pelanggaran  
Keamanan Informasi**  
**43**

**Terrorisme/  
Radikalisme**  
**17**

**Separatisme/  
Organisasi Terlarang**  
**1**

**Pencemaran  
Nama Baik**  
**1**

**Berita Bohong  
/HOAKS**  
**1**

**Kekerasan/  
Kekerasan pada Anak**  
**1**

**Konten yang Melanggar  
Nilai Sosial dan Budaya**  
**0**

**Konten yang  
Meresahkan Masyarakat**  
**0**

**SARA**  
**0**

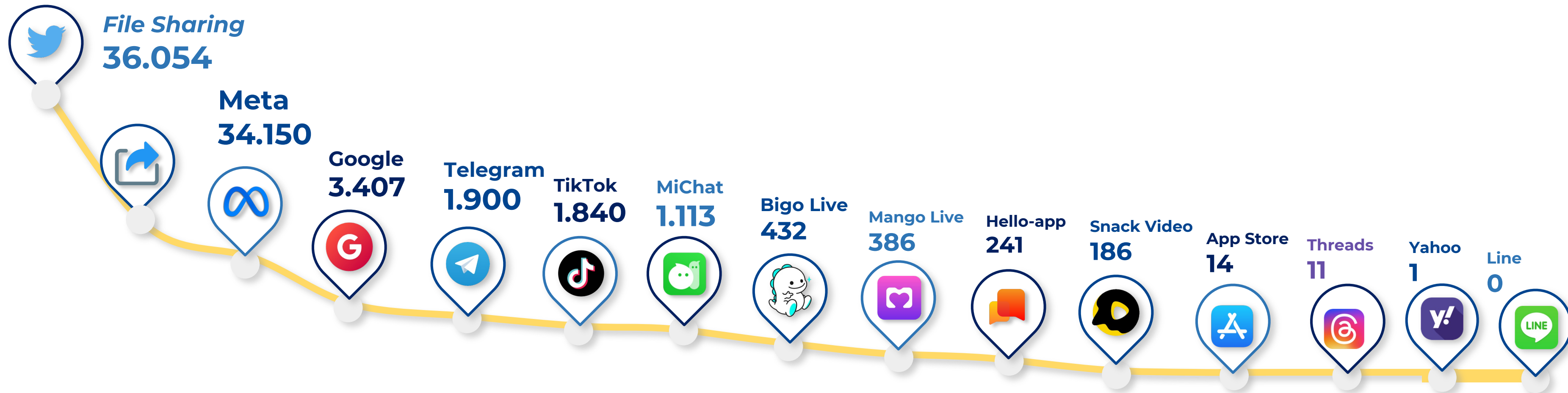
**Perdagangan Produk  
dengan Aturan Khusus**  
**0**

# STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL

Periode 1 Januari - 28 Agustus 2023

**TOTAL : 231.923**

**Twitter**  
**152.089**



## LANDASAN HUKUM

# PM KOMINFO NO.5/2020 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

### Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Dilarang

#### PASAL 14

**ayat (1):**

Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh:

- a. masyarakat;
- b. Kementerian atau Lembaga;
- c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
- d. lembaga peradilan.

**ayat (2):**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

- a. situs web (website) dan/atau aplikasi;
- b. surat non elektronik; dan/atau
- c. surat elektronik (electronic mail).

**ayat (3):**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:

- a. terorisme;
- b. pornografi anak; atau
- c. **konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.**



## Pasal 43 ayat 1

UU No. 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik  
serta perubahannya

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, **PPNS tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik** diberi **wewenang khusus** sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

## Wewenang PPNS ITE

- **Menerima laporan atau pengaduan**
- Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
- Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha
- Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
- Melakukan penggeledahan
- Melakukan penyegelan dan penyitaan
- **Membuat suatu data elektronik dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses**
- Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik
- Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan
- Mengadakan penghentian penyidikan

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan **data elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, **angka**, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## ARAH REGULASI [REVISI KE 3 UU ITE]

### Pasal 40

Draft Revisi UU No. 11 Tahun  
2008 tentang  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik  
serta perubahannya

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

#### Penjelasan:

Yang dimaksud dengan pemutusan akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten. Termasuk dalam "melakukan pemutusan akses" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial. Termasuk dalam "memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses" adalah memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan **pemblokiran** terhadap akun media sosial, **rekening bank**, uang elektronik, dan/atau aset digital.

### Wewenang PPNS ITE

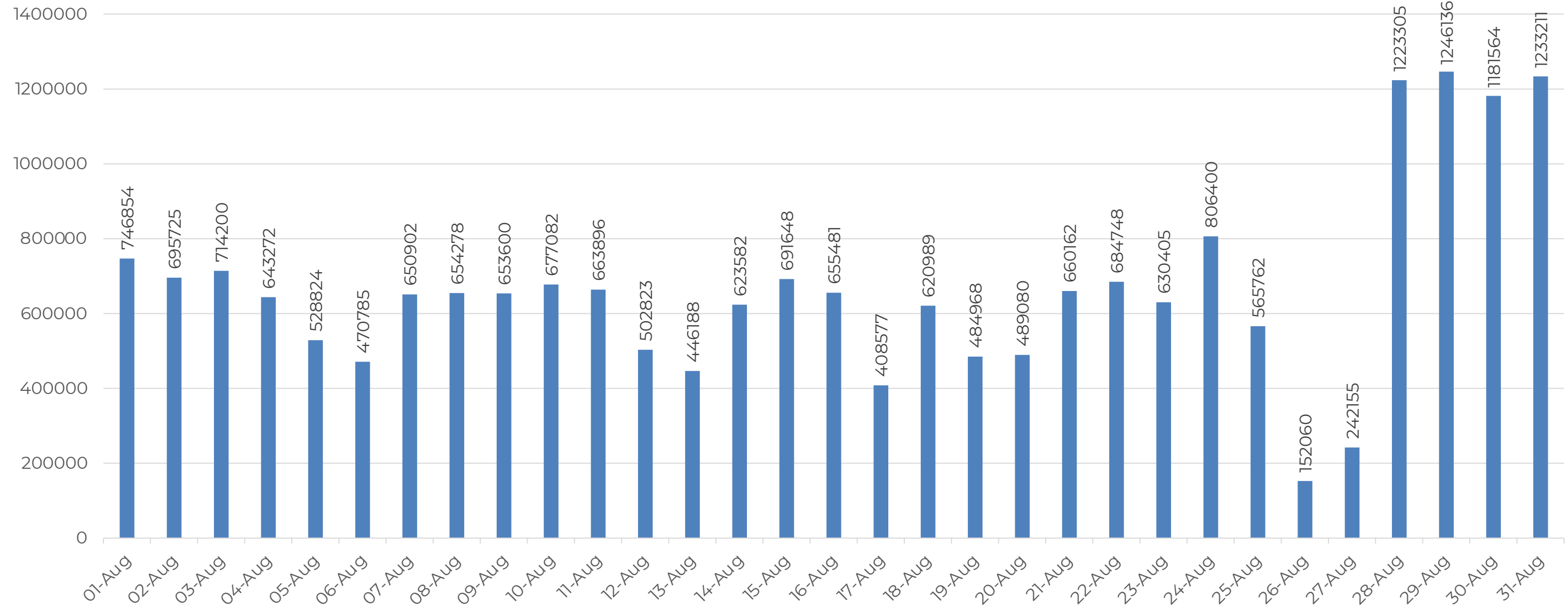
- **Menerima laporan atau pengaduan**
- Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
- Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha
- Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
- Melakukan penggeledahan
- Melakukan penyegelan dan penyitaan

- Membuat suatu data elektronik dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses
- Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik
- Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan
- Mengadakan penghentian penyidikan
- **memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.**

#### Penjelasan:

- Yang dimaksud pemutusan akses lihat penjelasan Pasal 40 ayat (2b). Yang dimaksud dengan pemutusan akses sementara ialah selama diperlukan dalam proses penegakan hukum.

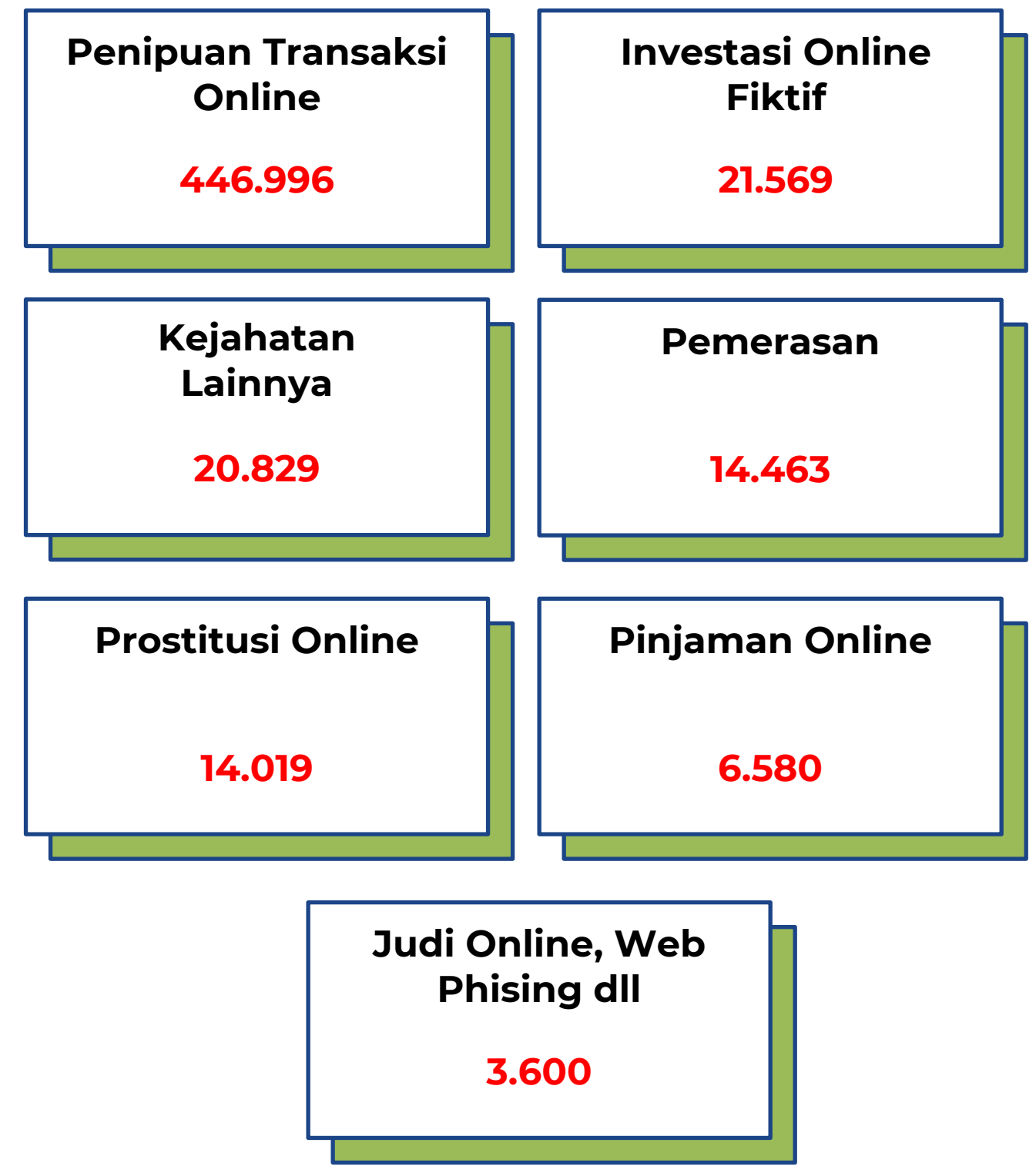
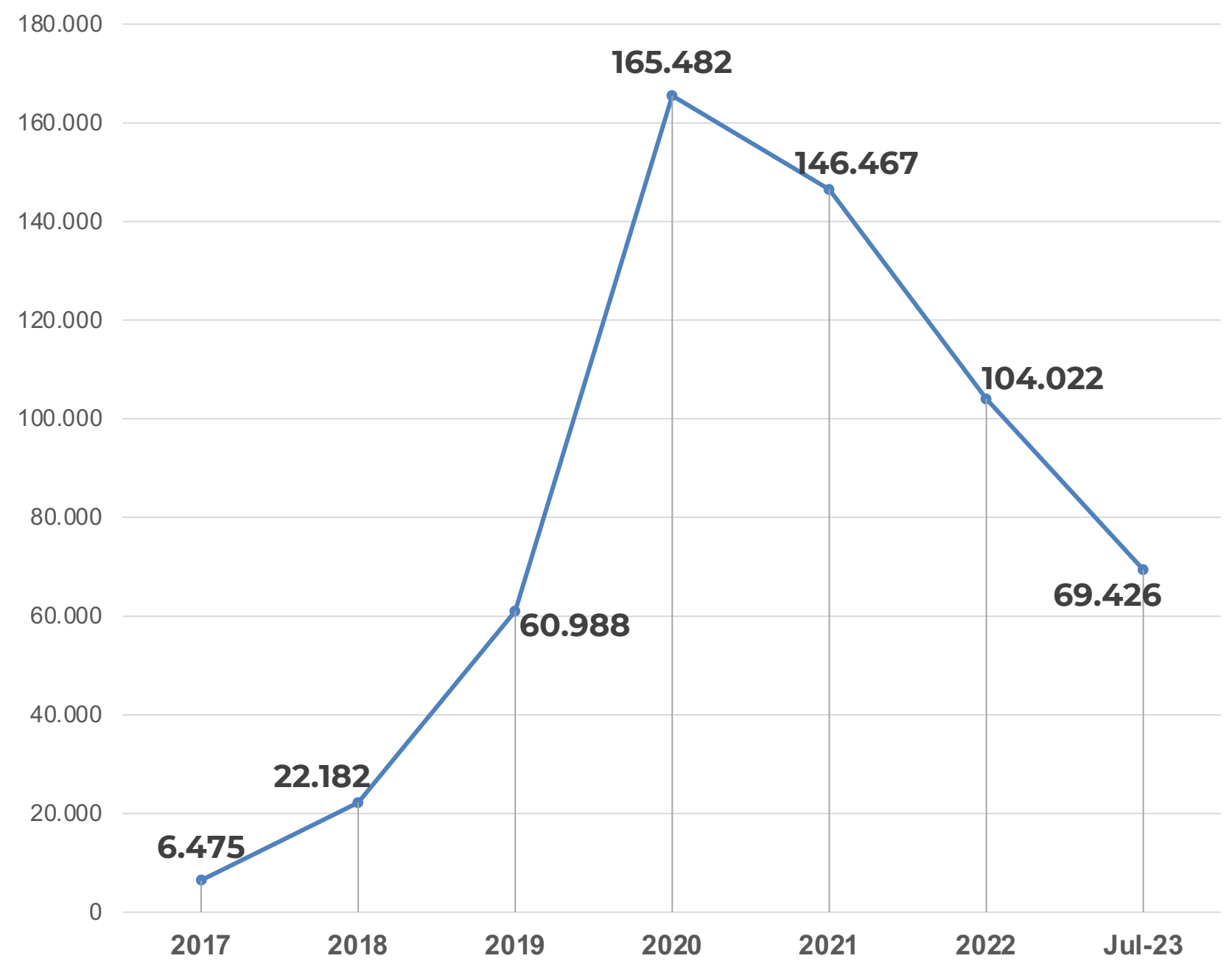
# TRAFFIC REQUEST LAYANAN CEKREKENING AGUSTUS 2023



**Total Request : 20.648.662 Request**

# STATISTIK LAPORAN ADUAN CEKREKENING 2017 – 2023

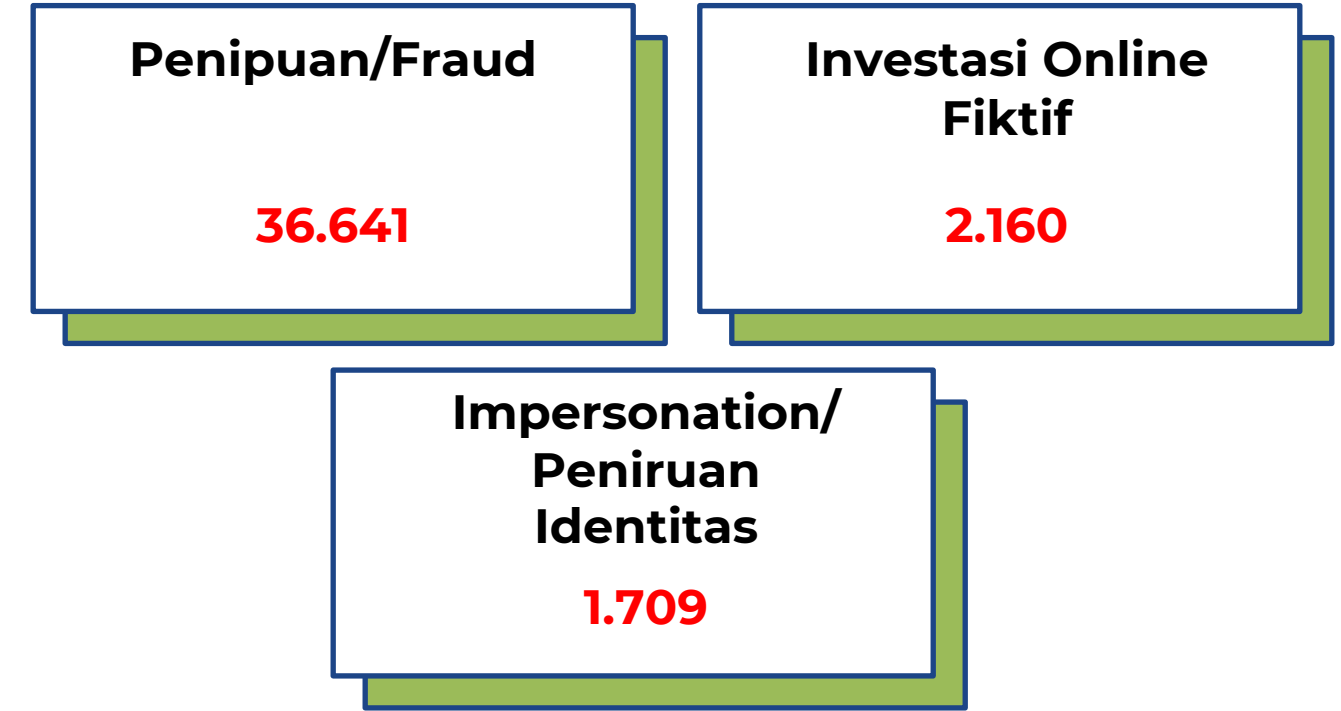
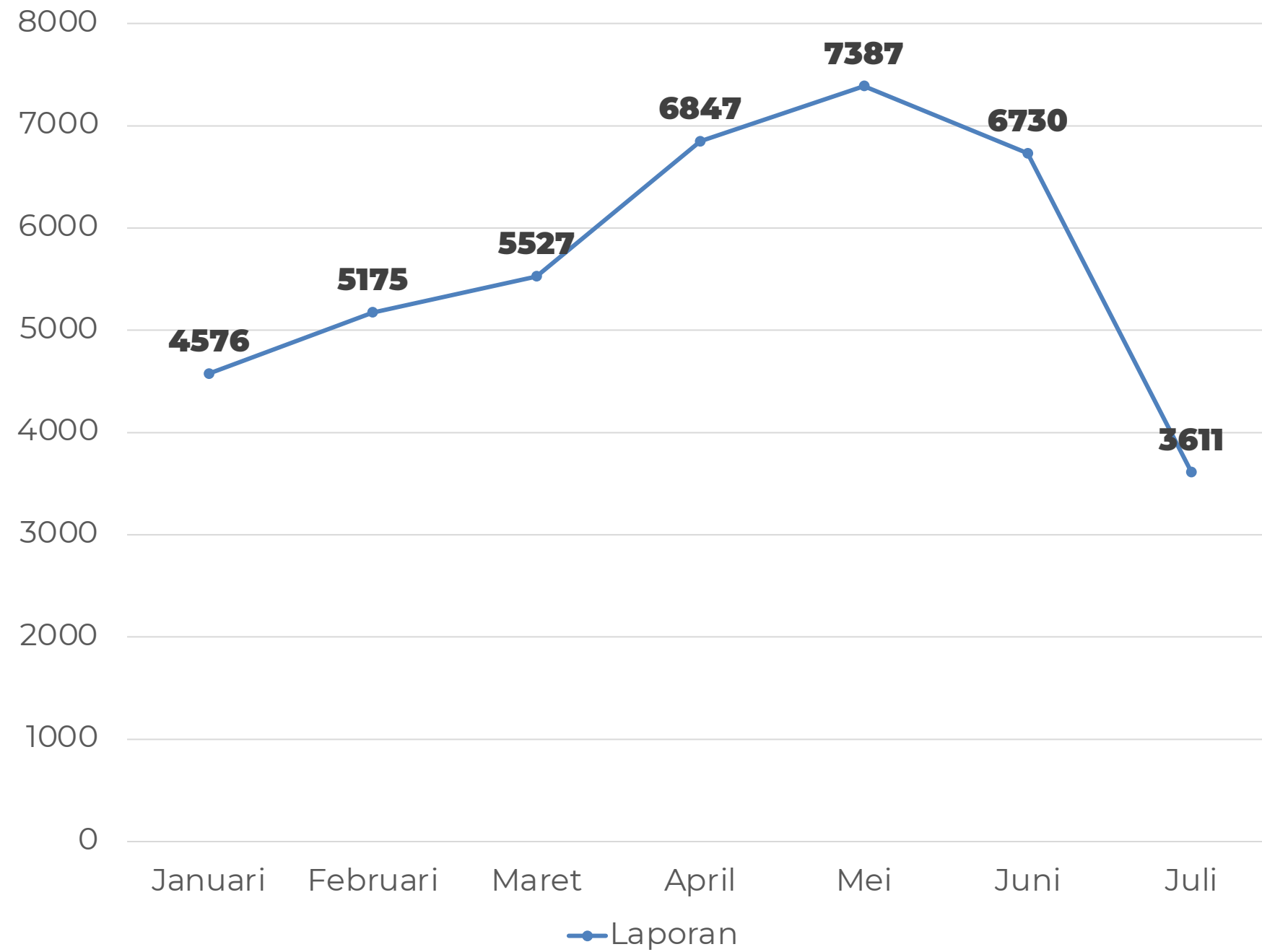
**TOTAL : 575.042**





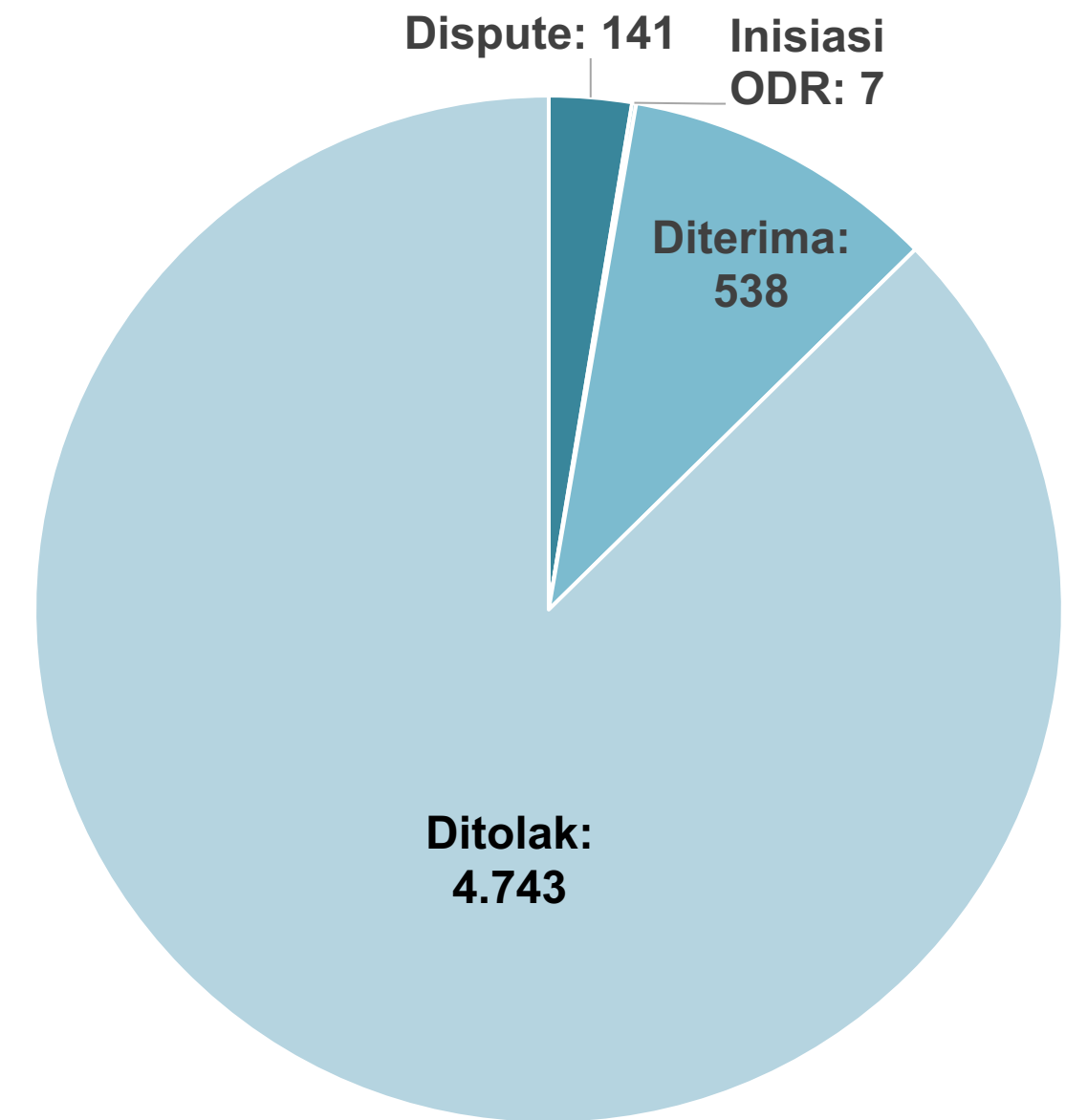
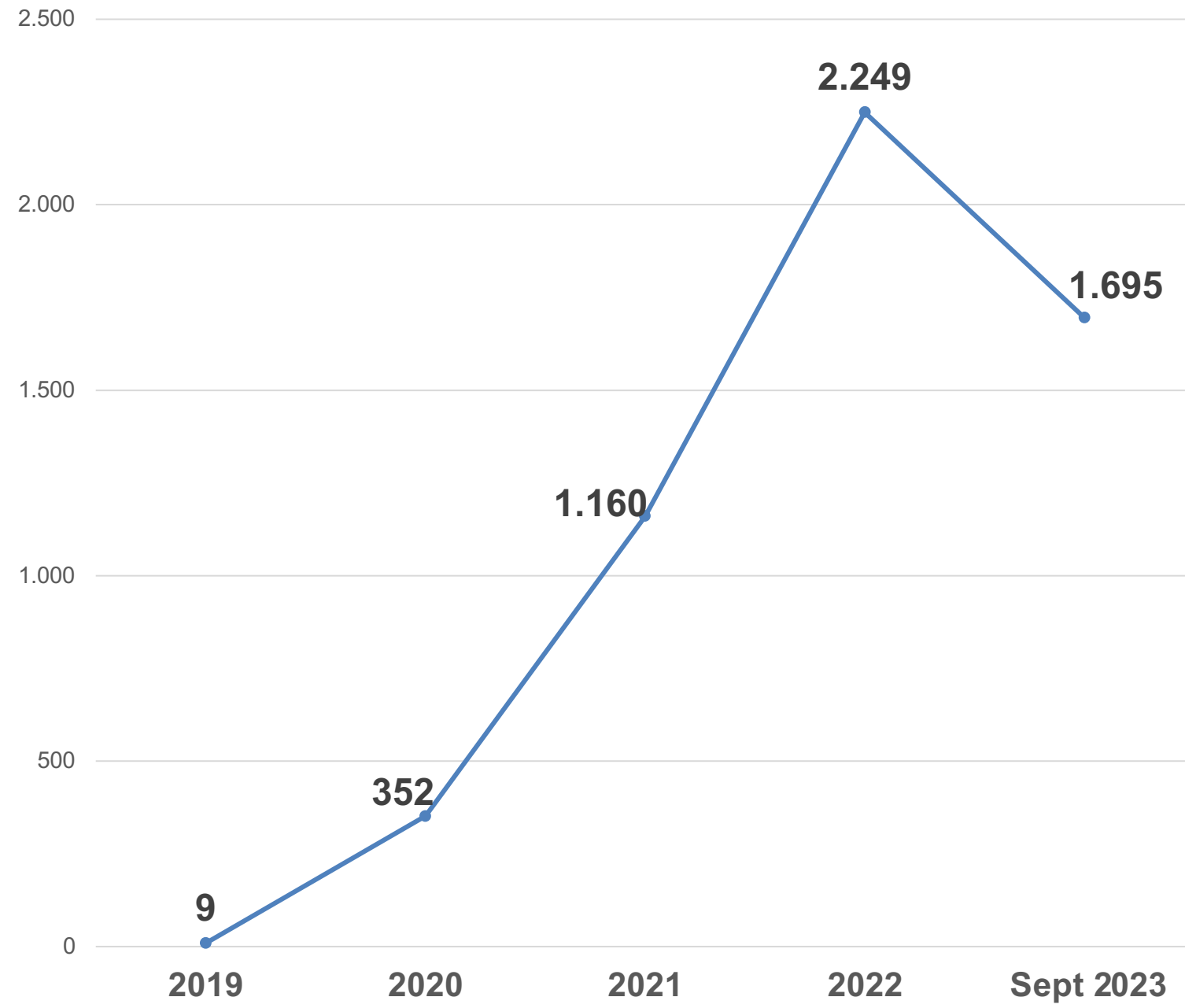
# STATISTIK LAPORAN ADUANNOMOR 2023

**TOTAL : 39.853**

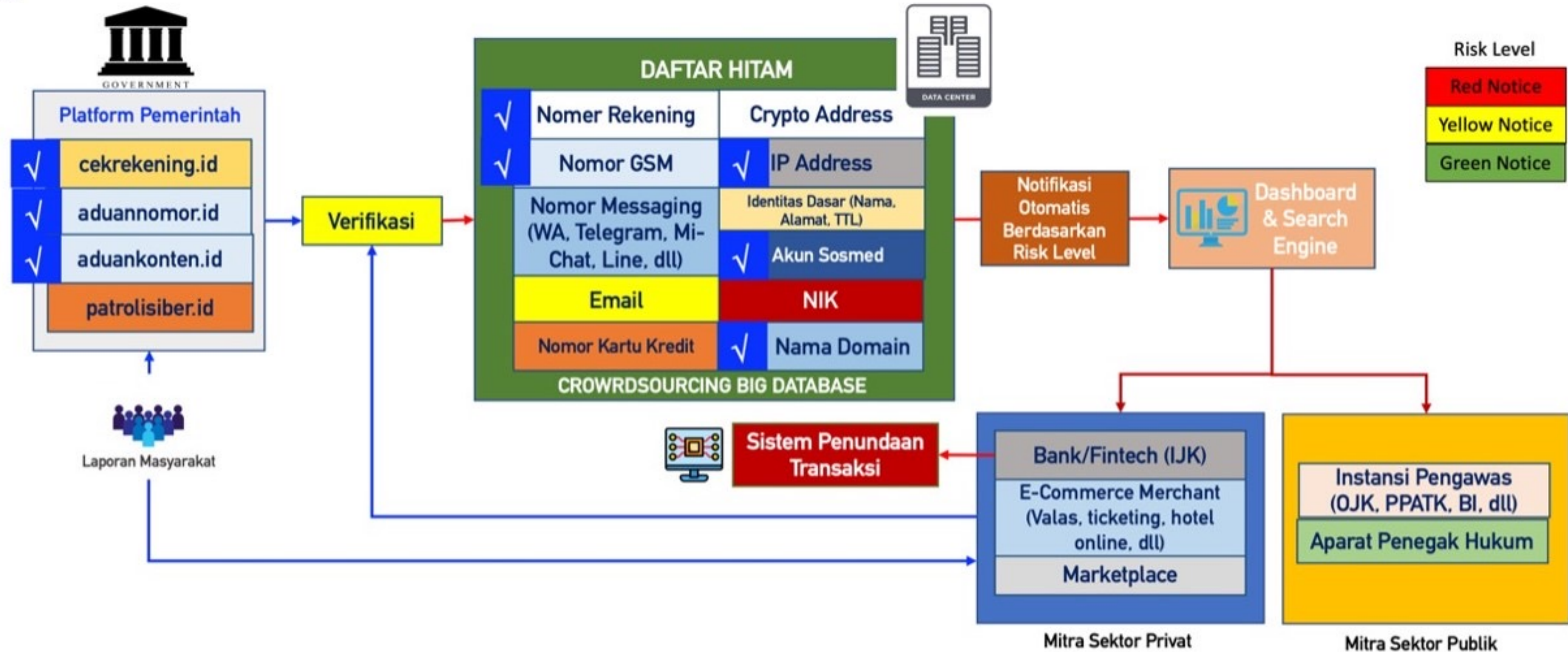


# STATISTIK SANGGAH REKENING

**TOTAL : 5.429**



# SKEMA PORTAL DATABASE BLACKLIST NASIONAL



### Kriteria Red Notice

1. Dilaporkan lebih dari 10 kali dalam sehari
2. Dilaporkan korban langsung dan telah diverifikasi dengan kerugian diatas 5 juta rupiah
3. Dilaporkan lebih dari 5 kali dari 3 sumber laporan yang berbeda
4. Dilaporkan lebih dari 15 kali dalam 7 hari terakhir



### Kriteria Yellow Notice

1. Dilaporkan 3-9 kali dalam sehari
2. Dilaporkan 3-5 kali dari 2 sumber laporan berbeda dalam sehari
3. Dilaporkan 5-14 kali dari 3 sumber laporan yang berbeda

### Kriteria Green Notice

Dilaporkan 1-2 kali dalam sehari



Saat ini Dikelola/Dimiliki Kominfo

## OUR PARTNERS





# TerimaKasih.

**Subdit Penyidikan, Penindakan dan Laboratorium Forensik Digital**

Gd. Utama Lantai 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

0818140188



# **Penerapan APU-PPT Di Era Keuangan Digital**

**Jakarta, 7 Nopember 2023**

# OUTLINE MATERI



Statistik Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto



Penerapan Program APU PPT dan PPSPM di SJK Agar *Keep Up* Dengan Perkembangan Digitalisasi



Urgensi Penerapan Program APU PPT dan PPSPM di SJK



Lain-lain: Contoh Beberapa Regtech Tools Yang Sedang Diuji Coba OJK di Dalam Regulatory Sandbox

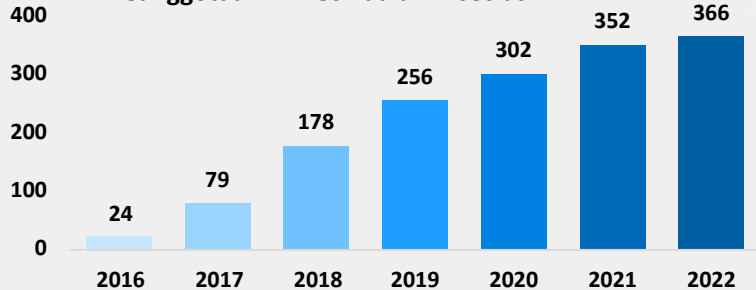


# Statistik Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

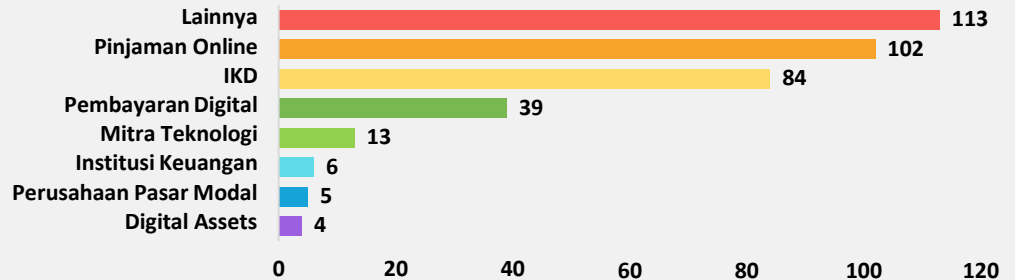


# Overview Perkembangan Industri ITSK di Indonesia

Keanggotaan FinTech dalam Asosiasi



Sebaran Kluster Model Bisnis Anggota Asosiasi Tahun 2022



## Perkembangan ITSK di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor:

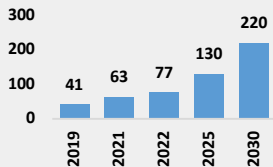
### Penduduk Usia Kerja



**143,7 juta Jiwa Angkatan Kerja**

atau 68,6% dari jumlah penduduk usia kerja. Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi pada 2020-2045 (BPS, Agustus 2022).

### Ekonomi Berbasis Internet (US\$ Miliar)



Gross Merchandise Value (GMV) internet Indonesia mencapai US\$77 miliar pada 2022 dan diperkirakan mencapai US\$220-360 miliar pada 2030 (e-Conomy SEA, 2022).

### Populasi Unbanked & Underbanked



**48%**

penduduk dewasa Indonesia tergolong kelompok unbanked atau tidak memiliki akses ke rekening bank.

Dari kelompok tersebut 36% menyebut jarak merupakan penghalang untuk mendapatkan akses ke rekening bank (World Bank, 2022).

### Literasi dan Inklusi Keuangan & Digital



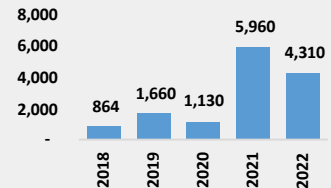
Masih adanya gap antara inklusi keuangan digital dengan literasi keuangan digital. Selama 3 tahun (2019-2022) kenaikan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia hanya 5% (OJK, 2022).

### Regulasi yang Kondusif



BI dan OJK masing-masing meluncurkan regulatory sandbox Fintech pada 2017 dan 2018. Selain itu, OJK juga meluncurkan Pusat Inovasi Fintech digital untuk membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia pada 2018.

### Investasi ITSK (US\$ Juta)

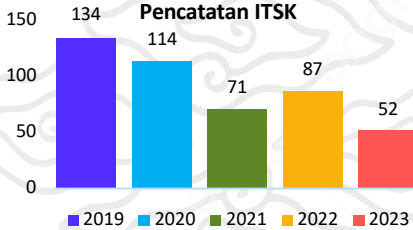


Perusahaan Fintech di Indonesia mengumpulkan investasi lebih dari US\$8,9 miliar melalui 194 kesepakatan pada periode 2018-Q3 2022. Pada 2022 saja, investasi Fintech di Indonesia mencapai US\$4,3 miliar melalui 41 kesepakatan.

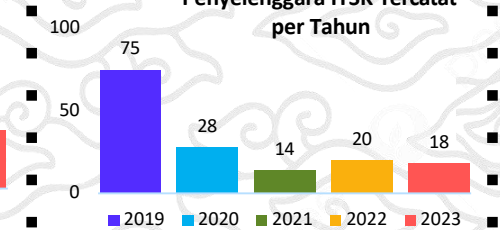
# Overview Data Statistik Penyelenggara ITSK Tercatat di OJK



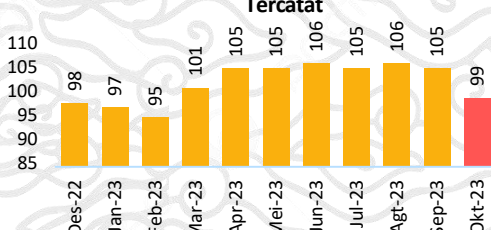
Jumlah Pengajuan Permohonan Pencatatan ITSK



Penyelenggara ITSK Tercatat per Tahun



Tren Jumlah Penyelenggara ITSK Tercatat



99 Penyelenggara ITSK yang tercatat di OJK dikelompokkan ke dalam 14 Klaster berdasarkan model bisnis sebagai berikut ini:

**39**  
AGGREGATOR

**4**  
FINANCIAL PLANNER

**5**  
REGTECH E-SIGN

**17**  
CREDIT SCORING

**2**  
TAX & ACCOUNTING

**3**  
INSURTECH

**6**  
E-KYC

**1**  
ONLINE DISTRESS SOLUTION

**7**  
FINANCING AGENT

**2**  
WEALTH TECH

**1**  
INSURANCE HUB

**1**  
REGTECH PEP

**3**  
FUNDING AGENT

**8**  
TRANSACTION AUTHENTICATION

**2** Asosiasi Fintech:

- Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)

Data per Oktober 2023



# Perkembangan Aset Kripto di Indonesia

Jumlah pelanggan terdaftar aset kripto masih dalam tren meningkat, sementara nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19

## EKOSISTEM ASET KRIPTO



Bursa Berjangka  
Penyelenggara  
Perdagangan Aset  
Kripto



Lembaga Kliring  
Berjangka



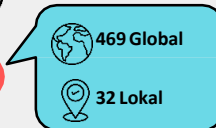
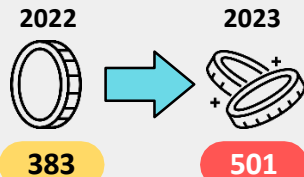
Pengelola Tempat  
Penyimpanan Aset  
Kripto



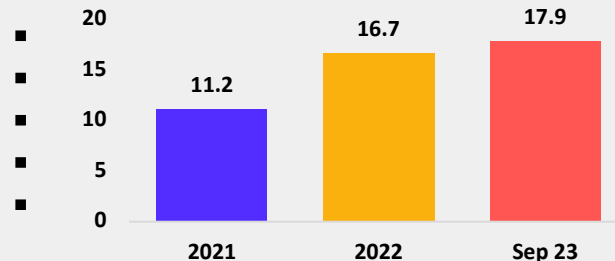
32 Calon Pedagang  
Fisik Aset Kripto  
(CPFAK)



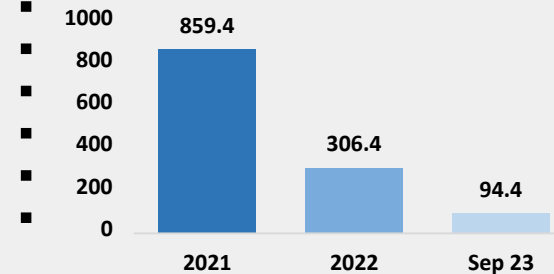
Aset Kripto yang  
diperdagangkan di  
Pasar Fisik Aset Kripto



Jumlah Pelanggan  
Terdaftar (Investor)  
Aset Kripto (Juta Jiwa)



Nilai Transaksi  
Aset Kripto  
(Triliun Ruliah)





# Penerapan Program APU PPT dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan di Era Digitalisasi



# Peralihan Kewenangan Pengawasan aktivitas *Virtual Asset*

## JENIS PIHAK PELAPOR

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah PP No. 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)				2. Penyedia Barang dan Jasa	
<b>BANK INDONESIA</b>	<b>BAPPEBTI</b>	<b>OJK</b>		<b>PPATK</b>	<b>DJKN</b>
PVA	KOMODITI	BANK	WALI AMANAT	PROPERTI	BALAI LELANG
APMK	<b>VASP</b>	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PEGADAIAN	KENDARAAN BERMOTOR	
E-MONEY		ASURANSI & PIALANG ASURANSI	MODAL VENTURA	PERMATA DLL	
KUPU		DPLK	PEMB. INFRASTRUKTUR	SENI/ANTIK	
		PERUSAHAAN EFEK	LKM	<b>3. Profesi</b>	
<b>PPATK</b>	<b>KEMENKOP &amp; UMKM</b>	MANAJER INVESTASI	LPEI	<b>PPATK</b>	<b>KEMENKUMHAM</b>
PERPOSAN	KOPERASI SP	BANK KUSTODIAN	LPPBTI/P2P LENDING	ADVOKAT	NOTARIS
		SECURITIES CROWDFUNDING	<b>VASP</b>	PPAT	<b>KEMENKEU</b>
				PERENCANA KEUANGAN	AKUNTAN
					AKUNTAN PUBLIK

Merujuk UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, OJK akan memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan aset kripto yang berlaku efektif pada Januari 2025

## Cakupan Penyempurnaan POJK No. 8/2023

Verifikasi tatap muka dan tidak tatap muka secara elektronik menggunakan sarana elektronik milik Pihak Ketiga



Mendukung **perkembangan teknologi informasi**, yaitu dengan menyempurnakan:

- **ketentuan mengenai verifikasi tatap muka (*face to face*) secara elektronik, dan**
- **verifikasi tidak tatap muka (*non-face to face*) secara elektronik,**

apabila PJK menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga (*provider e-KYC*).

# Identifikasi dan Penilaian Risiko Terhadap Produk, Praktik Usaha, dan Teknologi Baru

PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan **penilaian risiko** TPPU/TPPT yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.



Pasal 18 POJK 8/2023

1



## **IDENTIFIKASI**

Meminta data, informasi, dan dokumen pendukung

2



## **VERIFIKASI**

1. Memastikan kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan; dan
2. Memastikan kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah

3

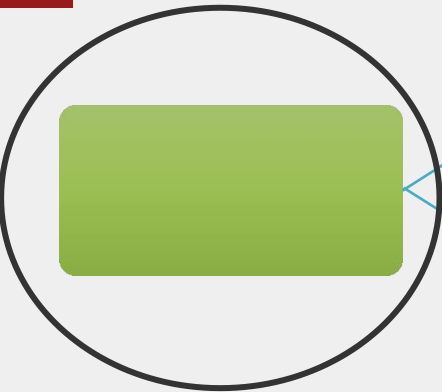


## **PEMANTAUAN**

Memantau Transaksi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya



# Verifikasi

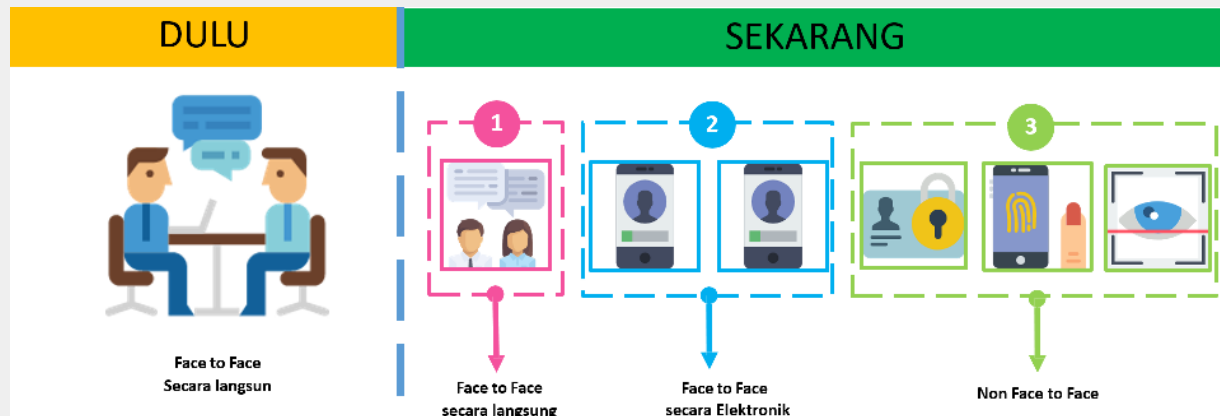


Memastikan kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan

Membandingkan identitas yang diberikan dengan database yang dipercaya

Memastikan kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah

Memeriksa kesesuaian ciri-ciri fisik



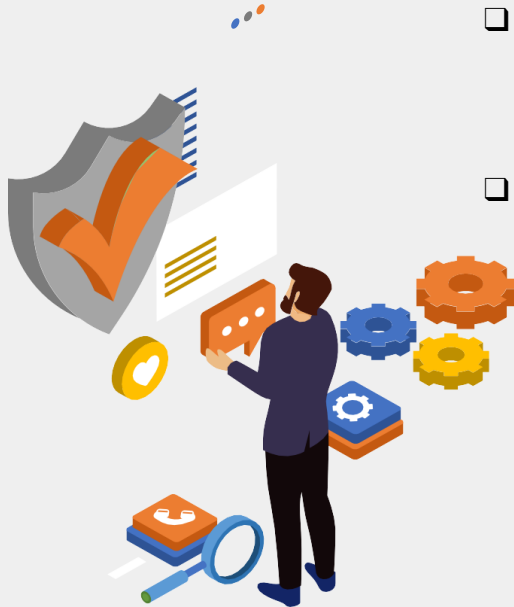
Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) POJK 8/2023

# Verifikasi Pertemuan Tatap Muka Secara Elektronik



- ❑ pegawai PJK melakukan pertemuan tatap muka secara real-time dan online dengan Calon Nasabah;
- ❑ pegawai PJK menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga; dan
- ❑ Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, yang diakses atau telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik Calon Nasabah.

Pasal 21 ayat (4) POJK 8/2023



- ❑ PJK menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga;
- ❑ Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga yang diakses atau telah diunduh dan terpasang melalui perangkat keras atau telah terpasang di perangkat keras milik Calon Nasabah; dan
- ❑ PJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (authentication factor), berupa:
  1. sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*), yaitu ciri-ciri fisik dan/atau data biometric yang bersifat bawaan dan unik bagi setiap orang, antara lain wajah (facial recognition), pola sidik jari (fingerprint), dan pola retina/iris mata (retinal pattern); dan
  2. sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*), yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk yang wajib disertai pula dengan hal lainnya, seperti one-time password (OTP), tanda tangan digital - 12 - (digital signature), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

PJK dapat menambahkan faktor keaslian (authentication factor) lainnya, berupa sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (*something you know*), yaitu sesuatu yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Calon Nasabah saja, seperti username, password, personal identification number (PIN), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan

# Pemanfaatan Pihak Ketiga Dalam Verifikasi Tatap Muka dan Tidak Tatap Muka Secara Elektronik

**1**

PJK wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak ketiga

**2**

pihak ketiga merupakan perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, memiliki izin dan/atau memperoleh persetujuan dari OJK

**3**

pihak ketiga wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperoleh hak akses dan/atau memfasilitasi hak akses data kependudukan pada kementerian atau lembaga tersebut, sistem elektronik yang dimiliki oleh pihak ketiga terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dimaksud

**PJK wajib bertanggung jawab atas hasil verifikasi  
serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data hasil verifikasi dimaksud**

Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4) POJK 8/2023



# Cakupan Perjanjian Kerjasama dg Pihak Ketiga Dalam Verifikasi Tatap Muka dan Tidak Tatap Muka Secara Elektronik



Pasal 22 ayat (3) POJK 8/2023



# Urgensi Penerapan Program APU PPT dan PPSPM di SJK

# AML Basel Index – Posisi Indonesia

## ASIA TIMUR DAN PACIFIC



Country	Overall score 2020	Ranking 2020	Overall score 2021	Ranking 2021	Overall score 2022	Ranking 2022
VIETNAM	7,04	12	#N/A	#N/A	7,04	10
CHINA	6,76	18	6,7	17	6,69	21
THAILAND	6,01	33	6,15	24	5,80	40
PHILIPPINES	5,67	45	5,76	37	5,68	45
MALAYSIA	5,25	65	5,47	46	5,33	54
SAUDI ARABIA	5,33	60	5,12	59	5,28	56
<b>INDONESIA</b>	<b>4,62</b>	<b>96</b>	<b>4,68</b>	<b>76</b>	<b>5,19</b>	<b>62</b>
JAPAN	5,16	69	4,99	64	4,70	86
KOREA, SOUTH	4,61	98	4,63	80	4,51	96
SINGAPORE	4,56	102	4,65	78	4,28	100
AUSTRALIA	3,84	124	3,75	98	3,65	115
UNITED KINGDOM	#N/A	#N/A	4,05	93	3,63	117
NEW ZEALAND	3,24	135	3,53	101	3,32	124
FINLAND	#N/A	#N/A	3,06	109	2,88	128

\*)Negara dengan score rendah merupakan negara berisiko rendah

Indonesia memiliki rangkin/risiko yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia yang menjadi anggota FATF yakni Malaysia, China dan Saudi Arabia. Di level ASEAN, Indonesia merupakan negara kedua berisiko terendah setelah Singapura.

### Penentuan kriteria berisiko tinggi untuk Basel AML Index



**Tahun 2022 Indonesia pada peringkat-62 dengan nilai akhir 5,19**

# Evektifitas APU PPT dan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

## AML Basel Index

RANK	JURISDICTION	OVERALL SCORE
126	Sweden	3.12
127	Andorra	2.89
128	Finland	2.88

Income and region categories by [World Bank](#). 128 jurisdictions listed

Sumber : [www.baselgovernance.org](http://www.baselgovernance.org)

## World Happiness Index

Rank	Country	Score
1	Finland	7.804
2	Denmark	7.586
3	Iceland	7.530
4	Israel	7.473
5	Netherlands	7.403
6	Sweden	7.395
7	Norway	7.315
8	Switzerland	7.240
9	Luxembourg	7.228
10	New Zealand	7.123

Sumber : [worldhappiness.report](#)

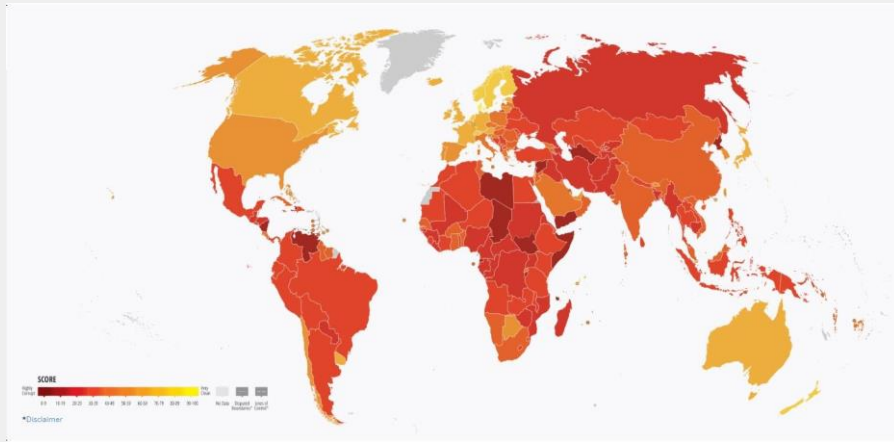
- Swedia merupakan negara dengan AML Basel *score* atau risiko TPPU/TPPT terendah ke 3 di dunia, dan masuk dalam daftar 10 negara paling bahagia di dunia.
- Efektifitas penerapan APU PPT akan berimplikasi pada tingkat keamanan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.





**Corruption Perception Index**  
menunjukkan tingkat persepsi publik  
terhadap tindakan korupsi di suatu  
wilayah

## Corruption Perception Index



Negara	CPI Score 2021	Ranking 2021	CPI Score 2022	Ranking 2022
Denmark	88	1	90	1
Singapore	85	4	83	5
Malaysia	48	62	47	61
Vietnam	39	87	42	77
Indonesia	38	96	34	110
Thailand	35	110	36	101
South Sudan	11	180	13	178

Pada tahun 2022, dari 180 negara yang dilakukan penilaian Indonesia berada pada posisi ke 110 dengan score 34. Indonesia mengalami penurunan score dan ranking dari tahun sebelumnya.

# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

## Sektor Jasa Keuangan

### 1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

### 2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

## PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



1. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme

2. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

3. Berdasarkan kajian dari *World Bank* didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan

4. Penerapan program APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK karena:

- Mengurangi risiko adanya *fraud*,
- Membantu dalam melindungi nasabah dan investor,
- Meningkatkan integritas PJK.

## Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5  
UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



- Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
- Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

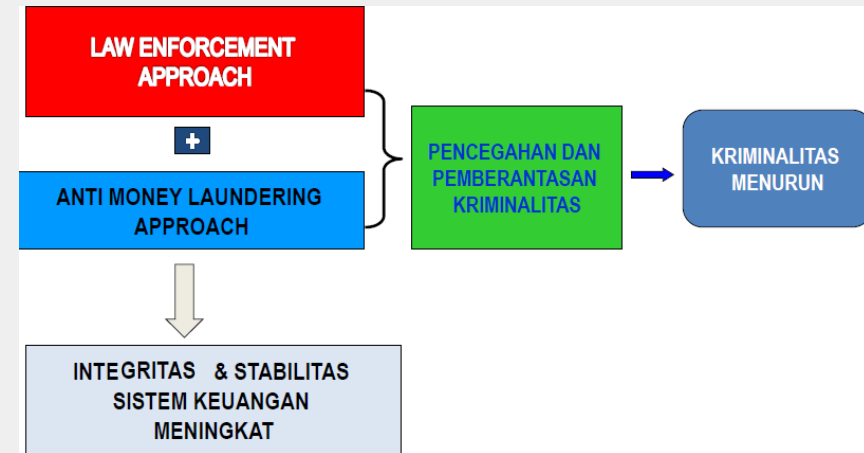


PJK merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT

- PJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- PJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- PJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- PJK menjalankan kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada *Financial Intelligence Unit/FIU* (PPATK)



Penerapan program APU PPT yang efektif akan menghasilkan laporan kepada PPATK yang berkualitas untuk membantu pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.





**Lain-lain: Contoh Beberapa  
Regtech Tools Yang Sedang Diuji  
Coba OJK di Dalam Regulatory  
Sandbox**

# RegTech Tools yang Saat Ini Sedang Diuji coba di dalam Regulatory Sandbox OJK



## E-KYC

Sarana elektronik untuk melakukan identifikasi pelanggan dan memungkinkan identitas pelanggan online dan/atau digital.

### Manfaat:

- Membantu perusahaan lebih mengenali penggunanya
- Mempermudah proses onboarding
- Meningkatkan conversion rate
- Membantu dalam penilaian risiko



## E-Sign

Tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan PSrE Indonesia yang diakui KOMINFO

### Manfaat:

- Berkekuatan hukum setara dengan Tanda Tangan Basah
- Keamanan Identitas terjamin
- Eco-Friendly
- Dapat menghemat biaya pengeluaran



## ICS (Innovative Credit Scoring)

Pengolahan data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai assesment kelayakan seseorang menerima layanan LJK

### Manfaat:

- Meningkatkan efektivitas penilaian risiko kredit
- Memberikan peluang akses pendanaan bagi masyarakat unbanked
- Perluasan akses keuangan



## Authentication Platform

Platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah menggunakan data selain Dukcapil

### Manfaat:

- Mempermudah identifikasi dan verifikasi nasabah secara digital menggunakan sumber data alternatif
- Mengurangi risiko fraud karena perusahaan dapat lebih mengenal penggunanya





# Innovative Credit Scoring

Innovative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan assesment kelayakan seseorang menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan.





**Terima Kasih**